

Massa di Sorong Kembali Blokade Jalan

Selasa , 20 Agustus 2019 | 13:15



Sumber Foto Cnnindonesia.com Situasi di Kota Sorong, Papua Barat.

SORONG - Masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Sorong, Papua Barat kembali turun ke jalan melakukan aksi protes terkait insiden pengepungan asrama mahasiswa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Berdasarkan laporan jurnalis Transmedia, Jersy Allen, massa melakukan long march dari berbagai titik. Titik berkumpulnya massa untuk melakukan aksi itu adalah di depan Kantor Wali Kota Sorong yang berada di Jalan Pendidikan. Mereka juga memblokade jalan.

"Semua terkonsentrasi di depan Kantor Wali Kota ini melakukan orasi. Belum ada pejabat yang terlihat menemui warga," ujar Jersy Allen dari dekat kantor Wali Kota Sorong, Selasa (20/8/2019).

Untuk pengamanan selain dikawal polisi, terlihat pula sejumlah anggota TNI Angkatan Laut.

Massa mulai berkumpul di depan Kantor Wali Kota Sorong usai melakukan long march itu sekitar pukul 11.30 WIT. Sementara itu situasi di kota Sorong, dilaporkan Jersy bahwa terjadi pemblokiran jalan-jalan di dalam kota tersebut.

Sempat terjadi aksi pelemparan yang dilakukan sekelompok massa ke arah Gedung Disdukcapil Kota Sorong.

Terlihat juga ada aksi pembakaran lapak-lapak penjual yang dikumpulkan di persimpangan Jalan Pendidikan dan Jalan Maleo. Kktivitas warga di Kota Sorong saat ini masih berhenti. Sekolah-sekolah juga diliburkan.

Gusti, warga setempat ketika dihubungi *sinarharapa.co* melalui sambungan telepon mengatakan, aksi masih berlangsung hingga siang ini. Kondisi serupa terjadi di Manokwari, Papua Barat.

Kapolres Sorong Ajun Komisaris Besar Mario Christy P Siregar mengatakan perwakilan massa aksi itu telah diterima Wali Kota Sorong Lambert Jitmau di dalam kantornya. "Ini lagi di kantor wali kota dan diterima pak wali kota, kami [polisi] melakukan pengawalan," ujarnya seperti dikutip *cnnindonesia.com*.

"Sudah diterima oleh bapak walkot sekarang mendengarkan aspirasi," sambungnya.

Aksi massa di Papua dan Papua Barat itu terjadi menyikapi insiden yang menimpa mahasiswa asal provinsi di pulau paling timur Indonesia itu di Surabaya dan Malang.

Masalah Papua itu pun kemudian memicu kemarahan warga, sehingga pemerintah pusat pun mencoba menjembatani. Rencananya Kementerian Dalam Negeri akan memanggil para kepala daerah terkait perihal pemicu masalah di Papua tersebut.

Dugaan Perlakuan Rasial Terhadap Mahasiswa Papua

Dinilai Patut Diusut Tuntas

SP Suara Pembaruan

Selasa, 20 Agustus 2019 - 12:40



Lenis Kogoya (kanan) bersama Presiden Joko Widodo.

Jakarta, Beritasatu.com - Peristiwa dugaan perlakuan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) sepatutnya diusut tuntas. Kapolri Jenderal Tito Karnavian diharapkan memeriksa setiap orang yang melakukan penghinaan.

"Siapa pun yang melakukan, bahasa apapun, Kapolri harus periksa dong. Jangan dibiarkan. Itu yang membuat ke depan tidak terjadi lagi. Oknum-oknum ini harus diperiksa. Kita ini negara hukum," tegas Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua, Lenis Kogoya.

Hal itu disampaikan Lenis usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2019). "Saya minta kepolisian, setiap asrama (Papua) di mana, minta dijaga. Ormas (organisasi masyarakat) manapun yang mengganggu, provokatornya harus ditangkap. Siapa pun dia," tegas Lenis.

Di sisi lain, Lenis mengungkapkan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memang telah meminta maaf apabila ada warga Jatim yang mengeluarkan kata-kata rasial. Akan tetapi, lanjut Staf Khusus Presiden Bidang Papua tersebut, pelaku penghinaan bukan dari pemerintah.

"Oknum. Kami ingin tahu oknum ini siapa dan siapa di belakang itu. Nanti kalau dibiarkan ke depan akan terjadi hal yang sama. Kalau kita susah urus, nanti ke depan kejadian lagi. Jadi kami ingin tahu siapa di belakang dia. Itu harus pihak kepolisian harus cari," tukas Lenis.